

DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Diana

¹Politeknik Negeri Lhokseumawe, Aceh, email: diana@pnl.ac.id

Received Date; 27 Juni 2023 Revised Date; 15 Juli 2023 Accepted Date; 28 Juli 2023	Abstract <i>Fiscal decentralization can improve regional efficiency, but its results depend on revenue authority, transfer design, expenditure quality, and institutions. This systematic review examines links among decentralization, fiscal autonomy, growth, inequality, and poverty. Peer-reviewed studies published from 1998 to July 2023 were searched through Google Scholar, Crossref, and publisher websites. Thirty substantive studies were synthesized, including nine publications from the requested Google Scholar profile that provide Indonesian and Acehnese fiscal context. Revenue decentralization is more consistently associated with growth when local tax authority and accountability are meaningful. Transfers can narrow fiscal gaps, yet weak formulas may reduce own-source revenue effort. Indonesian evidence is mixed because fiscal capacity, public-service quality, and institutions vary widely. Policy should combine stronger local revenue administration, transparent equalization, productive spending, and performance monitoring.</i>
<i>The Keywords:</i> <i>Fiscal Decentralization</i> <i>Regional Fiscal Autonomy</i> <i>Economic Growth</i>	
<i>Kata Kunci:</i> <i>Desentralisasi Fiskal</i> <i>Kemandirian Daerah</i> <i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	Abstrak Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi daerah, tetapi hasilnya bergantung pada kewenangan pendapatan, desain transfer, kualitas belanja, dan institusi. Kajian sistematis ini menelaah hubungan desentralisasi, kemandirian fiskal, pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan. Artikel peer-reviewed periode 1998 sampai Juli 2023 ditelusuri melalui Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit. Sebanyak 30 studi substantif disintesis, termasuk sembilan publikasi dari profil Google Scholar yang diminta sebagai konteks fiskal Indonesia dan Aceh. Desentralisasi penerimaan lebih konsisten berkaitan dengan pertumbuhan apabila kewenangan pajak dan akuntabilitas daerah bermakna. Transfer dapat memperkecil kesenjangan fiskal, tetapi formula yang lemah dapat menurunkan upaya Pendapatan Asli Daerah. Bukti Indonesia bersifat campuran karena kapasitas fiskal, mutu layanan publik, dan institusi sangat beragam. Kebijakan perlu menggabungkan penguatan administrasi pendapatan, pemerataan transparan, belanja produktif, dan pemantauan kinerja.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan pengalihan sebagian kewenangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah

subnasional. Secara teoretis, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat karena memiliki informasi yang lebih dekat mengenai preferensi warga dan biaya pelayanan. Namun, kedekatan tersebut tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan. Keterbatasan basis pajak, ketergantungan transfer, kualitas birokrasi, dan lemahnya akuntabilitas dapat mengurangi manfaat desentralisasi (Oates 1999; Martinez-Vazquez, Lago-Peñas, and Sacchi 2017).

Literatur lintas negara memberikan hasil yang tidak seragam. Davoodi and Zou (1998) menemukan hubungan negatif pada sejumlah negara berkembang, sedangkan Akai and Sakata (2002) serta Iimi (2005) memperoleh bukti yang lebih positif setelah pengukuran dan karakter institusi diperhatikan. Zhang and Zou (1998) menunjukkan bahwa pembagian belanja yang tidak sesuai dengan kapasitas daerah dapat menekan pertumbuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa indikator desentralisasi penerimaan, belanja, dan otonomi pajak tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran yang identik.

Kemandirian keuangan daerah tercermin pada kemampuan membiayai layanan publik dari pendapatan yang dikendalikan sendiri. Pendapatan Asli Daerah memperkuat hubungan antara pembayaran pajak dan tuntutan pelayanan, tetapi ruang fiskal daerah tidak merata. Daerah dengan basis ekonomi besar lebih mudah mengembangkan pajak dan retribusi, sementara daerah tertinggal bergantung pada dana perimbangan. Transfer diperlukan untuk pemerataan vertikal dan horizontal, transfer yang tidak mempertimbangkan kapasitas pajak, kebutuhan belanja, dan kinerja dapat menimbulkan soft budget constraint serta mengurangi upaya pemungutan. Aceh menunjukkan bahwa belanja modal dan penerapan basis akrual berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al. 2023), adapun budget ratcheting memperkuat atau melemahkan hubungan kinerja fiskal dengan belanja modal (Liza & Mariana 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber yang dekat dengan objek dan layanan lokal. Mariana (2023) menunjukkan bahwa praktik pembayaran PBB di Kabupaten Pidie masih bergantung pada administrasi pemungutan dan pemahaman wajib pajak. Temuan tersebut relevan bagi ekonomi fiskal karena desentralisasi penerimaan hanya efektif apabila basis data, penilaian objek, penagihan, dan legitimasi pelayanan berjalan bersamaan.

Selain pertumbuhan, desentralisasi memengaruhi distribusi. Sepulveda and Martinez-Vazquez (2011) menemukan bahwa dampak terhadap kemiskinan dan ketimpangan bergantung pada ukuran pemerintah dan kapasitas redistribusi. Qiao, Martinez-Vazquez, and Xu (2008) memperlihatkan trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan, sedangkan studi Indonesia menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dapat mengurangi kesenjangan pendapatan fiskal tanpa selalu menghapus ketimpangan hasil pembangunan (Akita, Riadi, and Rizal 2021).

Kualitas institusi menjadi penghubung utama. Desentralisasi dapat memperkuat akuntabilitas dan membatasi korupsi ketika pemilih memperoleh informasi dan pemerintah lokal memiliki kewenangan nyata (Fisman and Gatti 2002). Sebaliknya, fragmentasi kewenangan tanpa pengawasan dapat meningkatkan elite capture. Enikolopov and Zhuravskaya (2007) menegaskan

bahwa partai politik dan insentif nasional menentukan apakah desentralisasi menghasilkan disiplin atau penyalahgunaan. Temuan mengenai kualitas tata kelola dan nilai ekonomi juga menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan serta kredibilitas informasi dalam pengambilan keputusan (Mariana, Abdullah, and Mahmud 2020).

Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan: bagaimana desentralisasi penerimaan dan belanja memengaruhi pertumbuhan regional; bagaimana transfer dan kemandirian fiskal memengaruhi ketimpangan serta kemiskinan; dan kondisi institusional apa yang menjelaskan perbedaan hasil. Kontribusi kajian adalah menyusun kerangka ekonomi fiskal yang menghubungkan struktur pendapatan, komposisi belanja, transfer, dan tata kelola dalam satu alur kebijakan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan systematic literature review dengan prinsip transparansi seleksi PRISMA 2020 (Page et al. 2021). Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit dengan kata kunci berbahasa Inggris dan Indonesia: "fiscal decentralization economic growth", "revenue decentralization regional inequality", "intergovernmental transfers poverty Indonesia", "kemandirian fiskal daerah pertumbuhan ekonomi", dan "pajak daerah transfer fiskal". Periode kajian ditetapkan 1998 sampai Juli 2023.

Artikel dimasukkan apabila diterbitkan pada jurnal peer-reviewed, membahas desentralisasi penerimaan atau belanja, transfer antarpemerintah, kemandirian fiskal, pertumbuhan, ketimpangan, kemiskinan, atau kualitas institusi, serta menyajikan kerangka teori atau bukti empiris yang dapat diekstraksi. Artikel opini, kajian tanpa metode yang jelas, dan penelitian yang tidak memisahkan dimensi fiskal dikeluarkan. Korpus akhir terdiri atas 30 studi substantif. Sembilan karya pada profil Google Scholar yang diminta dimasukkan secara selektif karena berkaitan dengan pajak daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, budget ratcheting, belanja modal, subsidi, bantuan sosial, pembiayaan lokal, tata kelola, atau kualitas informasi ekonomi.

Data diekstraksi berdasarkan wilayah, periode, unit analisis, indikator desentralisasi, metode, dan arah temuan. Sintesis dilakukan secara tematik, bukan meta-analisis, karena ukuran desentralisasi dan variabel hasil sangat heterogen. Temuan dikategorikan ke dalam empat tema yang dapat tumpang tindih: pengukuran dan teori, desentralisasi penerimaan dan pertumbuhan, transfer serta distribusi, dan institusi serta akuntabilitas.

Aspek	Kriteria
Periode	1998-Juli 2023
Sumber	Google Scholar, Crossref, dan laman penerbit
Jenis	Artikel jurnal peer-reviewed; karya profil penulis sebagai konteks lokal
Fokus	Pendapatan, belanja, transfer, pertumbuhan, ketimpangan, kemiskinan
Korpus	30 studi substantif + rujukan metode PRISMA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peta Tematik Literatur

Literatur berkembang dari perdebatan mengenai ukuran desentralisasi menuju analisis desain kebijakan. Studi awal banyak menggunakan rasio belanja atau penerimaan subnasional terhadap total pemerintah. Studi yang lebih baru membedakan pendapatan yang benar-benar dikendalikan daerah dari dana yang hanya dibelanjakan daerah, serta memasukkan kualitas institusi, komposisi belanja, dan ketimpangan kapasitas. Perbedaan definisi menjelaskan sebagian besar variasi hasil.

Tema	Jumlah*	Temuan dominan
Teori dan pengukuran	10	Ukuran penerimaan, belanja, dan otonomi pajak menghasilkan interpretasi berbeda.
Penerimaan dan pertumbuhan	13	Lebih positif ketika kewenangan pajak, akuntabilitas, dan kapasitas administrasi memadai.
Transfer dan distribusi	12	Transfer membantu pemerataan, tetapi dapat menekan upaya PAD dan efisiensi.
Institusi dan akuntabilitas	11	Kualitas politik, transparansi, dan pengawasan menentukan arah dampak.

*Jumlah tema dapat tumpang tindih karena satu studi dapat membahas lebih dari satu mekanisme.

Integrasi Karya dari Profil Google Scholar

Profil Google Scholar yang diberikan memuat sejumlah penelitian yang relevan dengan ekonomi fiskal. Kajian ini mengintegrasikan sembilan karya yang paling dekat dengan penerimaan daerah, penganggaran, belanja modal, perlindungan sosial, subsidi, serta tata kelola keuangan. Karya yang tidak secara langsung membahas fiskal digunakan hanya sebagai literatur pendukung pada mekanisme informasi, likuiditas, dan institusi.

Karya yang disitasi	Kontribusi terhadap analisis ekonomi fiskal
Mariana, Abdullah, and Nadirsyah (2018), informasi akuntansi dan keputusan kredit	Menjelaskan pentingnya mutu informasi untuk akses pembiayaan dan aktivitas ekonomi daerah.
Mariana (2019a), bantuan rumah bagi kaum duafa	Memberi bukti kontekstual tentang penargetan belanja sosial, verifikasi penerima, dan akuntabilitas.
Mariana (2019b), harga LPG bersubsidi	Mendukung analisis insidensi subsidi, pengawasan distribusi, dan risiko penyimpangan harga.

Karya yang disitasi	Kontribusi terhadap analisis ekonomi fiskal
Nufiar, Mariana, and Ali (2020), kredit bermasalah pada UPK Pidie	Menghubungkan tata kelola dana bergulir lokal, risiko kredit, dan keberlanjutan pembiayaan masyarakat.
Mariana, Abdullah, and Mahmud (2020), tata kelola dan nilai perusahaan	Memperkuat dimensi institusi, transparansi, dan insentif pengelolaan sumber daya.
Mariana and Ibrahim (2022), determinan cash holding	Memberi perspektif likuiditas, belanja modal, dan kehati-hatian pengelolaan kas.
Ramadana et al. (2023), kinerja keuangan pemerintah daerah	Menyediakan bukti Aceh mengenai hubungan belanja modal, basis akrual, dan kinerja fiskal.
Liza and Mariana (2023), budget ratcheting dan belanja modal	Menunjukkan bahwa perilaku penyesuaian anggaran memoderasi alokasi investasi publik.
Mariana (2023), pembayaran PBB Kabupaten Pidie	Memberi bukti langsung mengenai administrasi pajak daerah, kepatuhan, dan penguatan PAD.

Karya-karya tersebut tidak diperlakukan sebagai pengganti literatur internasional, tetapi sebagai bukti kontekstual Indonesia dan Aceh. Penggunaannya memperkuat pembahasan mengenai administrasi penerimaan, kualitas belanja, akuntabilitas, subsidi, perlindungan sosial, likuiditas, dan pembiayaan ekonomi lokal.

Desentralisasi Penerimaan dan Pertumbuhan Regional

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu tujuan utamanya adalah memperkuat *fiscal accountability*, yaitu hubungan yang lebih jelas antara pajak yang dibayar masyarakat dan layanan publik yang mereka terima. Ketika pemerintah daerah memperoleh sebagian pendapatannya dari sumber lokal, masyarakat memiliki insentif lebih besar untuk mengawasi penggunaan anggaran. Pada saat yang sama, pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk menunjukkan bahwa penerimaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi layanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang bermanfaat.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan regional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola daerah. Hal yang lebih penting adalah jenis kewenangan yang diberikan, khususnya apakah pemerintah daerah benar-benar memiliki kemampuan menentukan basis, tarif, administrasi, dan penggunaan penerimaannya. Gemmell, Kneller, and Sanz (2013) menemukan

bahwa pemisahan antara desentralisasi penerimaan dan desentralisasi belanja penting dalam menjelaskan dampaknya terhadap pertumbuhan. Kewenangan pendapatan cenderung lebih mendukung pertumbuhan dibandingkan perluasan belanja daerah yang sebagian besar dibiayai melalui transfer dari pemerintah pusat.

Perbedaan tersebut dapat dijelaskan melalui insentif fiskal. Daerah yang memperoleh tambahan penerimaan ketika kegiatan ekonominya berkembang akan memiliki kepentingan lebih kuat untuk memperbaiki iklim investasi, menyediakan infrastruktur, menjaga kualitas layanan, dan mengembangkan basis pajaknya. Sebaliknya, apabila peningkatan kegiatan ekonomi tidak memberikan manfaat penerimaan yang berarti karena seluruh tambahan pendapatan dikendalikan pemerintah pusat, insentif daerah untuk memperluas basis ekonomi dapat menjadi lebih lemah.

Thornton (2007) menunjukkan bahwa hasil penelitian lintas negara dapat berubah ketika desentralisasi diukur berdasarkan kewenangan nyata, bukan hanya berdasarkan rasio penerimaan atau belanja daerah dalam anggaran nasional. Tingginya proporsi belanja daerah belum tentu menunjukkan tingginya otonomi apabila jenis program, standar pelayanan, dan penggunaannya masih ditentukan secara ketat oleh pemerintah pusat. Demikian pula, penerimaan yang dicatat dalam anggaran daerah belum tentu menunjukkan kemandirian apabila tarif, basis pajak, dan mekanisme pemungutannya tidak dapat ditentukan oleh daerah.

Oleh karena itu, pengukuran desentralisasi perlu membedakan antara tanggung jawab administratif dan kewenangan pengambilan keputusan. Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pelaksana program pemerintah pusat tanpa memiliki diskresi yang memadai. Dalam kondisi tersebut, desentralisasi hanya memindahkan pelaksanaan anggaran, tetapi tidak sepenuhnya memindahkan tanggung jawab politik dan fiskal. Dampaknya terhadap inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan regional menjadi terbatas.

Dampak positif desentralisasi penerimaan terhadap pertumbuhan dapat muncul melalui beberapa saluran. Pertama, pemerintah daerah memperoleh insentif untuk memperluas basis ekonomi karena sebagian manfaat penerimaan dari pertumbuhan tersebut dapat dipertahankan. Daerah dapat meningkatkan investasi pada jalan, pasar, kawasan produksi, perizinan, layanan digital, dan pengembangan sumber daya manusia guna menarik kegiatan usaha. Apabila peningkatan investasi dan produksi memperbesar penerimaan daerah, terbentuk hubungan yang saling memperkuat antara pembangunan ekonomi dan kapasitas fiskal.

Kedua, pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat, struktur ekonomi, potensi sumber daya, serta hambatan produksi di wilayahnya. Informasi lokal tersebut memungkinkan investasi publik

disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih spesifik. Daerah pertanian mungkin lebih membutuhkan irigasi, jalan produksi, fasilitas penyimpanan, dan pasar hasil tani, sedangkan daerah perkotaan membutuhkan transportasi umum, pengelolaan sampah, air bersih, dan pengendalian banjir. Kedekatan informasi dapat meningkatkan kesesuaian antara belanja publik dan kebutuhan ekonomi daerah.

Ketiga, desentralisasi dapat menciptakan persaingan antardaerah dalam menarik investasi, tenaga kerja, dan kegiatan ekonomi. Persaingan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah menyederhanakan pelayanan, meningkatkan transparansi, mempercepat perizinan, dan mengembangkan inovasi kebijakan. Praktik yang berhasil di suatu daerah juga dapat ditiru oleh daerah lain. Dengan demikian, desentralisasi dapat berfungsi sebagai ruang pembelajaran kebijakan dan eksperimen kelembagaan.

Meskipun demikian, persaingan antardaerah juga memiliki risiko. Pemerintah daerah dapat berlomba menurunkan pungutan atau memberikan insentif berlebihan sehingga mengurangi kemampuan membiayai layanan publik. Persaingan yang tidak terkoordinasi juga dapat mendorong pemindahan basis pajak tanpa meningkatkan kegiatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Karena itu, pemerintah pusat tetap perlu menetapkan standar minimum, mengatur pembagian basis pajak, dan mencegah praktik pungutan yang menghambat perdagangan antarwilayah.

Manfaat desentralisasi juga melemah ketika basis pajak lokal terlalu sempit. Banyak daerah hanya memiliki kewenangan atas pajak properti, kendaraan, hotel, restoran, hiburan, reklame, dan sejumlah retribusi. Potensi penerimaan dari sumber tersebut berbeda secara tajam antara daerah perkotaan, daerah industri, wilayah pariwisata, dan daerah pedesaan. Daerah dengan aktivitas ekonomi rendah akan kesulitan membiayai pelayanan dasar hanya melalui pendapatan asli daerah.

Biaya administrasi juga menjadi pertimbangan penting. Pemungutan pajak lokal membutuhkan data objek dan subjek, sistem penilaian, mekanisme pembayaran, penagihan, pemeriksaan, pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Apabila potensi penerimaan kecil sementara biaya administrasinya tinggi, pemungutan dapat menjadi tidak efisien. Oleh sebab itu, penguatan pendapatan asli daerah tidak harus dilakukan dengan menambah sebanyak mungkin jenis pungutan, tetapi melalui pemilihan basis yang produktif, sederhana, adil, dan mudah diawasi.

Pungutan daerah yang dirancang secara buruk dapat menghambat investasi dan mobilitas barang. Banyaknya retribusi, ketidakjelasan prosedur, perubahan tarif, dan biaya kepatuhan yang tinggi dapat memperbesar biaya usaha. Dalam jangka panjang, pungutan semacam ini dapat mempersempit basis ekonomi yang seharusnya menjadi sumber penerimaan. Dengan demikian, kebijakan pendapatan

daerah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap investasi, produksi, dan kesempatan kerja.

Bukti Indonesia menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi sangat berbeda antarwilayah. Kis-Katos and Sjahrir (2017) memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal dan politik memengaruhi investasi publik lokal. Namun, respons pemerintah daerah terhadap kewenangan baru dipengaruhi oleh struktur politik, kapasitas birokrasi, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang tersedia. Daerah dengan institusi yang lebih kuat cenderung lebih mampu menerjemahkan desentralisasi menjadi investasi publik yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Sofilda, Hamzah, and Kusairi (2023) menekankan adanya interaksi antara desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan daerah tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan atau pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan perlindungan sosial. Daerah yang memiliki sumber daya fiskal besar belum tentu tumbuh secara inklusif apabila belanjanya tidak meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Di Indonesia Timur, peningkatan penerimaan dan transfer belum secara otomatis menghapus ketimpangan regional. Farida, Suman, and Sakti (2021) menunjukkan bahwa hasil pembangunan dipengaruhi oleh keterbatasan konektivitas, kualitas layanan, struktur ekonomi, dan kapasitas pemerintah. Biaya transportasi yang tinggi, keterpisahan geografis, keterbatasan tenaga profesional, dan pasar yang kecil dapat mengurangi dampak tambahan anggaran. Karena itu, kebijakan fiskal perlu dikombinasikan dengan penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pengembangan pusat ekonomi, dan kerja sama antardaerah.

Desentralisasi penerimaan pada akhirnya akan lebih mendukung pertumbuhan apabila daerah memiliki kewenangan yang jelas, basis pajak yang memadai, administrasi yang efektif, dan insentif untuk memperluas kegiatan ekonomi. Kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan transparansi, pengawasan, dan mekanisme pemerataan agar kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah tidak semakin besar.

Transfer, Ketergantungan, dan Pemerataan Fiskal

Transfer antarpemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem desentralisasi. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, dan layanan lingkungan sering kali lebih besar daripada penerimaan yang dapat dihimpun dari pajak lokal. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kapasitas penerimaan tersebut disebut sebagai kesenjangan fiskal vertikal.

Selain kesenjangan vertikal, terdapat pula kesenjangan horizontal, yaitu perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan belanja antardaerah. Daerah dengan pusat industri, perdagangan, pariwisata, sumber daya alam, atau nilai properti yang tinggi memiliki basis penerimaan yang lebih besar dibandingkan daerah terpencil dan berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, daerah terpencil sering menghadapi biaya pelayanan yang lebih mahal karena jarak, kondisi geografis, kepadatan penduduk yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur.

Transfer diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh standar layanan dasar meskipun tinggal di daerah dengan basis pajak yang terbatas. Tanpa mekanisme pemerataan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan sangat bergantung pada kekayaan daerah. Kondisi tersebut dapat memperbesar migrasi, ketimpangan regional, dan perbedaan kesempatan ekonomi.

Formula pemerataan idealnya dirancang berdasarkan kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal. Kebutuhan belanja dapat mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah anak usia sekolah, karakteristik kesehatan, serta ketertinggalan infrastruktur. Sementara itu, kapasitas fiskal menggambarkan potensi daerah dalam memperoleh penerimaan dari sumbernya sendiri. Transfer diberikan untuk menutup sebagian kesenjangan antara keduanya.

Namun, transfer tidak seharusnya menggantikan seluruh upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan pendapatan. Apabila setiap kekurangan penerimaan selalu ditutup sepenuhnya oleh pemerintah pusat, daerah dapat kehilangan insentif untuk memperbaiki administrasi, memperluas basis pajak, atau meningkatkan kepatuhan. Desain transfer perlu menjaga fungsi pemerataan tanpa menghukum daerah yang berhasil meningkatkan penerimaan sendiri.

Akita, Riadi, and Rizal (2021) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berperan dalam pemerataan penerimaan fiskal di Indonesia. Meskipun demikian, ketimpangan antardaerah tetap dipengaruhi oleh konsentrasi sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan pendapatan asli daerah. Transfer dapat mengurangi kesenjangan kapasitas anggaran, tetapi belum tentu menghilangkan perbedaan hasil pembangunan apabila kualitas belanja dan kapasitas pelayanan juga berbeda.

Dalam praktiknya, jumlah transfer yang besar dapat menimbulkan ketergantungan fiskal. Ketergantungan terjadi ketika sebagian besar belanja daerah dibiayai oleh dana dari pemerintah pusat, sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah relatif kecil. Ketergantungan tidak selalu menunjukkan kegagalan karena beberapa daerah memang memiliki basis pajak yang terbatas. Masalah muncul ketika transfer mengurangi insentif untuk memperbaiki penerimaan, meningkatkan efisiensi, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat lokal.

Ketergantungan transfer juga dapat menimbulkan *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika belanja pemerintah daerah merespons peningkatan transfer lebih besar daripada merespons peningkatan pendapatan masyarakat. Dana yang diterima pemerintah seolah-olah “menempel” pada anggaran pemerintah dan lebih mudah dibelanjakan daripada dikembalikan kepada masyarakat melalui pengurangan pajak atau peningkatan tabungan fiskal. Akibatnya, pertumbuhan belanja dapat berlangsung tanpa hubungan yang kuat dengan permintaan dan pengawasan masyarakat.

Fenomena tersebut bukan alasan untuk menghapus transfer. Transfer tetap diperlukan untuk pemerataan dan penyediaan layanan dasar. Persoalannya terletak pada desain, transparansi, dan insentif yang terkandung di dalamnya. Transfer umum perlu didasarkan pada formula yang stabil agar daerah dapat menyusun perencanaan jangka menengah. Perubahan formula yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakpastian dan mendorong perilaku anggaran jangka pendek.

Transfer khusus diperlukan ketika pemerintah pusat ingin memastikan pembiayaan terhadap program atau standar layanan tertentu. Namun, transfer khusus yang terlalu rinci dapat membatasi fleksibilitas daerah dan mendorong pendekatan yang seragam, meskipun kebutuhan wilayah berbeda. Karena itu, persyaratan penggunaan dana sebaiknya berfokus pada standar pelayanan dan hasil yang ingin dicapai, bukan hanya pada rincian input.

Indikator hasil transfer khusus dapat mencakup peningkatan kehadiran siswa, cakupan imunisasi, akses air bersih, kualitas jalan, penurunan kematian ibu, atau waktu penyelesaian pelayanan. Pendekatan berbasis hasil memberikan ruang kepada daerah untuk memilih cara pelaksanaan yang paling sesuai. Namun, sistem tersebut membutuhkan data yang andal, indikator yang dapat diverifikasi, dan evaluasi yang memperhatikan kondisi awal setiap daerah.

Insentif kinerja juga harus dirancang secara hati-hati. Penghargaan berdasarkan capaian absolut dapat lebih banyak dinikmati daerah yang sejak awal memiliki pendapatan, tenaga profesional, dan sistem administrasi yang lebih baik. Sebaliknya, daerah tertinggal dapat terus memperoleh nilai rendah meskipun telah melakukan perbaikan yang besar. Oleh sebab itu, penilaian perlu mempertimbangkan kemajuan relatif, kualitas tata kelola, inovasi, dan kesulitan geografis.

Transfer yang bergantung pada realisasi belanja juga dapat mendorong daerah mengejar penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas. Tekanan untuk menghabiskan dana menjelang akhir tahun dapat menurunkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan proyek. Sistem transfer perlu memberi ruang untuk penganggaran multiyears, pengelolaan saldo secara bertanggung jawab, serta pemeliharaan aset agar daerah tidak hanya berorientasi pada penggunaan dana dalam satu tahun anggaran.

Dampak sosial desentralisasi dan transfer bersifat bersyarat. Siburian (2022) menemukan adanya hubungan antara desentralisasi fiskal dan kemiskinan di Indonesia, tetapi hasilnya bergantung pada kapasitas belanja dan kondisi daerah. Tambahan dana dapat menurunkan kemiskinan apabila digunakan untuk layanan dasar, infrastruktur produktif, bantuan sosial, dan pengembangan kesempatan kerja. Namun, dampaknya terbatas apabila belanja terkonsentrasi pada administrasi, proyek yang tidak relevan, atau program dengan kebocoran tinggi.

Siburian (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan regional masih menjadi persoalan penting. Desentralisasi dapat memperkuat pertumbuhan di daerah yang sudah memiliki basis ekonomi dan kapasitas institusi tinggi, tetapi tidak selalu menghasilkan manfaat yang sama bagi daerah tertinggal. Karena itu, sistem transfer harus membantu daerah meningkatkan kemampuan produktif, bukan sekadar membiayai pengeluaran rutin.

Evaluasi transfer tidak boleh berhenti pada jumlah dana yang disalurkan dan persentase penyerapan. Indikator perlu mencakup kualitas layanan, akses masyarakat, hasil pembangunan, dan distribusi manfaat. Peningkatan anggaran pendidikan, misalnya, perlu dikaitkan dengan partisipasi sekolah dan hasil pembelajaran. Belanja kesehatan perlu dikaitkan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, cakupan layanan, dan perlindungan rumah tangga dari pengeluaran medis.

Studi mengenai bantuan perumahan bagi kaum duafa dan penetapan harga LPG bersubsidi menunjukkan bahwa keberhasilan program redistributif sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, kualitas administrasi, dan pengawasan distribusi (Mariana 2019a, 2019b). Dana yang besar tidak akan menghasilkan pemerataan apabila penerima tidak teridentifikasi dengan tepat, prosedur sulit diakses, atau manfaat program dialihkan kepada kelompok yang tidak berhak.

Dengan demikian, transfer perlu dipahami sebagai instrumen pemerataan sekaligus instrumen pembentukan insentif. Sistem yang baik harus memungkinkan daerah menyediakan pelayanan dasar, mempertahankan dorongan untuk meningkatkan pendapatan sendiri, dan menghubungkan penggunaan dana dengan hasil pembangunan.

Institusi, Administrasi Pajak, dan Akuntabilitas

Desentralisasi memindahkan sebagian pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi perubahan lokasi kewenangan tidak otomatis meningkatkan kualitas keputusan. Pemerintah daerah mungkin memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat menghadapi risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, penangkapan kebijakan oleh elite lokal, dan lemahnya pengawasan.

Fisman and Gatti (2002) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat berkaitan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah. Kedekatan pemerintah dengan masyarakat memungkinkan warga memantau program, membandingkan kinerja, dan memberikan sanksi politik kepada pejabat yang tidak bekerja dengan baik. Namun, manfaat tersebut hanya muncul apabila informasi tersedia dan masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan.

Enikolopov and Zhuravskaya (2007) menekankan pentingnya institusi politik nasional dalam menentukan hasil desentralisasi. Sistem politik, partai, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, independensi pengawasan, serta mekanisme pemilihan memengaruhi perilaku pemerintah daerah. Desentralisasi dalam lingkungan kelembagaan yang lemah dapat memindahkan masalah tata kelola dari pusat ke daerah tanpa memperbaiki akuntabilitas.

Audit merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan fiskal daerah. Audit tidak hanya perlu memeriksa kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menilai kewajaran biaya, kualitas aset, efektivitas program, dan tindak lanjut atas temuan. Temuan yang berulang tanpa perbaikan menunjukkan bahwa audit belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran dan koreksi kebijakan.

Keterbukaan anggaran juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sumber penerimaan, alokasi belanja, kontrak, lokasi proyek, target penerima, dan hasil pelaksanaan. Informasi tersebut harus disajikan dalam format yang mudah dipahami, bukan hanya berupa dokumen teknis yang sulit diakses. Transparansi yang bermakna memungkinkan masyarakat membandingkan rencana dan realisasi serta mengidentifikasi penyimpangan.

Partisipasi warga dapat memperbaiki ketepatan prioritas anggaran. Forum perencanaan, konsultasi publik, survei kebutuhan, dan mekanisme pengaduan dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah pelayanan. Akan tetapi, partisipasi tidak boleh berhenti pada kegiatan formal. Pemerintah daerah perlu menjelaskan usulan yang diterima, yang ditolak, serta alasan pengambilan keputusan agar masyarakat melihat hubungan antara partisipasi dan kebijakan.

Pengadaan yang kompetitif merupakan bagian lain dari akuntabilitas. Belanja daerah yang besar menciptakan peluang penyimpangan apabila persaingan terbatas, spesifikasi diarahkan, atau pengawasan kontrak lemah. Pengadaan elektronik, keterbukaan informasi pemenang, data harga, dan pengawasan terhadap konflik kepentingan dapat meningkatkan nilai manfaat dari anggaran.

Kualitas data kinerja juga sangat penting. Pemerintah daerah sering memiliki data mengenai besarnya anggaran dan jumlah kegiatan, tetapi informasi mengenai kualitas layanan dan dampak program masih terbatas. Tanpa data hasil, tambahan anggaran cenderung didasarkan pada pola tahun sebelumnya dan kemampuan penyerapan, bukan pada efektivitas. Sistem informasi perlu

menghubungkan penerimaan, belanja, aset, kontrak, keluaran, dan hasil pembangunan.

Administrasi pendapatan merupakan bagian inti dari kapasitas institusional daerah. Studi Mariana (2023) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Pidie menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tarif dan objek pajak harus didukung oleh pemutakhiran data, penilaian yang tepat, mekanisme pembayaran, penagihan, dan komunikasi. Potensi pajak tidak otomatis menjadi penerimaan apabila data objek tidak lengkap atau wajib pajak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Pemutakhiran basis data dapat dilakukan melalui integrasi informasi pertanahan, perizinan bangunan, kependudukan, transaksi properti, dan penggunaan lahan. Data yang lebih baik membantu pemerintah menilai objek secara adil dan mengurangi perbedaan perlakuan. Namun, integrasi data perlu disertai perlindungan informasi pribadi, prosedur koreksi, dan mekanisme keberatan.

Kemudahan pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Pembayaran melalui bank, kanal digital, agen lokal, atau layanan keliling dapat mengurangi biaya waktu dan transportasi. Meski demikian, pemerintah perlu mempertahankan kanal luring bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Digitalisasi yang tidak inklusif dapat menciptakan hambatan baru dan memperbesar tunggakan.

Penagihan juga perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pemerintah dapat memulai dengan pemberitahuan, pengingat, fasilitas cicilan, dan pemutakhiran data sebelum menerapkan sanksi. Pendekatan yang terlalu represif dapat menurunkan kepercayaan, terutama apabila penilaian pajak dianggap tidak adil atau layanan publik belum menunjukkan perbaikan.

Kemandirian fiskal bukan hanya persoalan menaikkan tarif. Tarif yang tinggi pada basis yang sempit dapat mendorong penghindaran, tunggakan, dan ketidakpuasan. Strategi yang lebih berkelanjutan adalah memperluas basis, meningkatkan akurasi data, menyederhanakan prosedur, menutup kebocoran, dan membangun legitimasi pajak melalui peningkatan layanan publik.

Keadilan penilaian sangat menentukan kepatuhan. Masyarakat akan sulit menerima kewajiban pajak apabila properti atau kegiatan ekonomi yang serupa dikenakan beban berbeda tanpa alasan yang jelas. Mekanisme keberatan dan koreksi perlu tersedia agar kesalahan dapat diselesaikan tanpa biaya yang berlebihan. Transparansi metode penilaian juga membantu mengurangi persepsi diskriminasi.

Bukti bahwa penerimaan kembali kepada masyarakat merupakan unsur penting dalam pembentukan kontrak fiskal lokal. Penerimaan pajak sebaiknya dihubungkan dengan peningkatan jalan, kebersihan, air bersih, pasar, penerangan,

atau layanan lainnya. Hubungan tersebut tidak berarti setiap pembayaran harus dikembalikan secara langsung kepada pembayar, tetapi masyarakat perlu melihat bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik.

Kualitas informasi akuntansi dan non-akuntansi juga memengaruhi pengambilan keputusan pembiayaan. Mariana, Abdullah, and Nadirsyah (2018) menunjukkan pentingnya informasi dalam mendukung keputusan yang lebih baik. Dalam konteks pemerintah daerah, informasi keuangan perlu dilengkapi dengan kondisi aset, kualitas layanan, risiko program, kepuasan masyarakat, dan capaian pembangunan agar keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada saldo kas dan realisasi belanja.

Pengelolaan dana bergulir lokal juga membutuhkan tata kelola yang kuat. Kajian Nufiar, Mariana, and Ali (2020) mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada unit pengelola kegiatan menunjukkan pentingnya prosedur, dokumentasi, pengawasan, dan penyelesaian tunggakan. Program pembiayaan lokal dapat memperluas akses modal masyarakat, tetapi lemahnya penilaian kelayakan dan penagihan dapat mengurangi keberlanjutan dana.

Akuntabilitas harus mencakup keseluruhan siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, penetapan anggaran, pelaksanaan, pengadaan, pencatatan aset, evaluasi, hingga tindak lanjut. Kegagalan pada salah satu tahapan dapat mengurangi manfaat sumber daya fiskal. Transparansi tanpa penegakan tidak cukup, sedangkan penegakan tanpa akses informasi juga akan membatasi partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Kewenangan, Transfer, Belanja, dan Institusi

Sintesis literatur menghasilkan kerangka empat mata rantai dalam desentralisasi fiskal. Mata rantai pertama adalah kewenangan fiskal yang membentuk insentif pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan dan mengembangkan basis ekonomi. Daerah perlu mengetahui secara jelas sumber penerimaan yang dapat dikelola, batas kewenangan, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tambahan pendapatan yang dapat dipertahankan.

Mata rantai kedua adalah transfer antarpemerintah yang menentukan ruang fiskal dan pemerataan. Transfer harus memungkinkan daerah menyediakan pelayanan dasar meskipun kapasitas pajaknya terbatas. Namun, formula transfer juga perlu mempertahankan insentif untuk meningkatkan pendapatan sendiri, memperbaiki efisiensi, dan menghindari ketergantungan yang tidak produktif.

Mata rantai ketiga adalah komposisi dan kualitas belanja. Penerimaan yang besar tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan apabila dialokasikan pada program yang kurang produktif. Daerah perlu memprioritaskan infrastruktur dasar, konektivitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemeliharaan aset yang memiliki manfaat ekonomi serta sosial.

Mata rantai keempat adalah institusi yang menentukan apakah sumber daya digunakan secara akuntabel. Administrasi yang lemah, data yang tidak akurat, pengadaan yang tidak kompetitif, dan pengawasan yang terbatas dapat menghilangkan manfaat kewenangan dan transfer. Sebaliknya, institusi yang baik dapat membantu daerah dengan sumber daya terbatas memperoleh hasil pembangunan yang lebih besar.

Keempat mata rantai tersebut saling bergantung. Kewenangan penerimaan tanpa administrasi yang baik tidak menghasilkan pendapatan optimal. Transfer yang besar tanpa belanja produktif tidak mempercepat pembangunan. Belanja yang tepat tanpa pengawasan dapat mengalami kebocoran. Institusi yang kuat juga membutuhkan ruang fiskal agar dapat menyediakan layanan yang memadai.

Karena itu, evaluasi desentralisasi tidak boleh hanya menggunakan satu indikator, seperti rasio pendapatan asli daerah, besarnya transfer, atau persentase penyerapan anggaran. Evaluasi perlu menilai keseluruhan hubungan antara kewenangan, penerimaan, transfer, belanja, kualitas layanan, dan hasil pembangunan.

Implikasi Kebijakan Fiskal Daerah

Pertama, penguatan pendapatan asli daerah perlu diarahkan pada perluasan basis pajak, peningkatan kualitas data, digitalisasi administrasi, dan penilaian yang adil. Pemerintah daerah perlu menghindari penambahan pungutan yang menghasilkan penerimaan kecil tetapi meningkatkan biaya usaha. Penyederhanaan prosedur dan integrasi pembayaran dapat meningkatkan kepatuhan tanpa harus menaikkan tarif secara berlebihan.

Pemerintah daerah juga perlu memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat. Perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan perdagangan, pertumbuhan properti, sektor pariwisata, dan aktivitas jasa perlu tercermin dalam basis penerimaan. Namun, pengembangan basis tersebut harus menjaga daya saing dan memberikan perlindungan bagi usaha kecil serta rumah tangga berpendapatan rendah.

Kedua, desain transfer harus mempertahankan fungsi pemerataan sekaligus menjaga insentif pendapatan sendiri. Formula transfer perlu stabil, transparan, dan dapat diprediksi agar mendukung perencanaan jangka menengah. Indikator kebutuhan dan kapasitas harus diperbarui secara berkala agar mencerminkan kondisi daerah yang sebenarnya.

Transfer khusus sebaiknya dikaitkan dengan standar pelayanan dan hasil pembangunan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Insentif kinerja perlu mempertimbangkan perbaikan relatif dan kondisi awal agar tidak hanya menguntungkan daerah yang telah memiliki kapasitas tinggi.

Ketiga, belanja daerah perlu diprioritaskan pada kegiatan yang memiliki dampak produktivitas dan pemerataan. Infrastruktur baru harus diseleksi berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, sedangkan aset yang sudah ada perlu dipelihara. Jalan daerah, irigasi, air bersih, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, internet, dan transportasi publik dapat memberikan dampak besar apabila dibangun dan dioperasikan dengan baik.

Belanja pendidikan dan kesehatan perlu berfokus pada kualitas layanan, bukan hanya pembangunan fisik dan pembayaran administrasi. Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan guru, tenaga kesehatan, obat, peralatan, serta sistem pelayanan yang berfungsi. Kesenjangan antara wilayah perkotaan, pedesaan, terpencil, dan kepulauan perlu menjadi pertimbangan dalam alokasi.

Keempat, evaluasi kinerja harus menghubungkan input fiskal dengan keluaran dan hasil pembangunan. Peningkatan pendapatan daerah harus dinilai berdasarkan manfaatnya terhadap pelayanan, sedangkan transfer perlu dievaluasi dari kemampuannya mengurangi kesenjangan. Penyerapan anggaran tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Indikator kinerja perlu mencakup kualitas jalan, waktu tempuh, hasil pembelajaran, cakupan layanan kesehatan, akses air bersih, kemiskinan, kesempatan kerja, kepuasan masyarakat, dan ketimpangan wilayah. Data perlu dipublikasikan sampai tingkat yang cukup rinci agar masyarakat dapat menilai distribusi manfaat program.

Kelima, transparansi fiskal harus diperkuat melalui publikasi anggaran, kontrak, lokasi proyek, penerima manfaat, dan capaian program. Informasi perlu tersedia sampai tingkat kecamatan dan gampong agar masyarakat mengetahui manfaat pembangunan di wilayahnya. Kanal pengaduan dan tindak lanjut juga perlu diperkuat untuk mengoreksi penyimpangan.

Bagi Aceh dan daerah yang memperoleh kewenangan otonomi serta sumber transfer khusus, tantangan utama bukan hanya memastikan besarnya dana, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan kualitas penggunaannya. Ketergantungan yang tinggi pada transfer dapat menimbulkan risiko ketika kebijakan nasional berubah atau sumber dana khusus berkurang. Oleh karena itu, diversifikasi pendapatan perlu dilakukan sejak dini.

Diversifikasi tidak berarti menciptakan banyak pungutan baru, tetapi memperkuat aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan. Pengembangan pertanian bernilai tambah, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, ekonomi kreatif, dan jasa dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal. Kebijakan pendapatan perlu berjalan bersama peningkatan infrastruktur, keterampilan, akses pembiayaan, dan kepastian usaha.

Perencanaan multiyears diperlukan karena pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi administrasi tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Perencanaan tersebut harus mencakup biaya pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Tanpa perencanaan jangka menengah, daerah berisiko memiliki banyak proyek yang selesai secara fisik tetapi tidak dapat digunakan secara optimal.

Pengendalian belanja rutin juga menjadi penting. Belanja pegawai dan administrasi harus dijaga agar tidak mengurangi ruang bagi pelayanan serta investasi publik. Pengendalian tidak harus dilakukan melalui pemotongan secara seragam, tetapi melalui evaluasi kebutuhan organisasi, digitalisasi proses, pengurangan kegiatan yang tumpang tindih, dan pengaitan belanja dengan kinerja.

Basis data aset dan pajak perlu diintegrasikan agar pemerintah mengetahui potensi penerimaan, kondisi aset, biaya pemeliharaan, serta pemanfaatannya. Aset yang tidak digunakan dapat dioptimalkan, sedangkan aset yang rusak perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Pengelolaan aset yang baik dapat mengurangi kebutuhan pembangunan baru dan memperkuat pelayanan.

Pada tingkat kecamatan dan gampong, transparansi manfaat program perlu diperkuat agar masyarakat dapat membandingkan anggaran dengan hasil yang diterima. Informasi mengenai pembangunan jalan, bantuan sosial, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penggunaan dana desa perlu disampaikan secara terbuka. Kedekatan informasi tersebut dapat memperkuat pengawasan sosial serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Dengan demikian, keberhasilan desentralisasi fiskal daerah tidak dapat diukur hanya dari peningkatan pendapatan asli daerah atau besarnya transfer. Keberhasilan harus terlihat dari kemampuan pemerintah daerah mengubah sumber daya fiskal menjadi pertumbuhan regional, pelayanan publik yang berkualitas, penurunan kemiskinan, dan pemerataan kesempatan. Kewenangan, transfer, belanja, dan institusi harus diperbaiki secara bersamaan agar desentralisasi menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Systematic literature review menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh tunggal terhadap pertumbuhan regional. Desentralisasi penerimaan lebih konsisten menghasilkan manfaat ketika daerah memiliki kewenangan pajak yang nyata, administrasi yang mampu, dan akuntabilitas terhadap warga. Transfer antarpemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, tetapi desain yang lemah dapat memperbesar ketergantungan dan mengurangi upaya PAD. Dampak pada ketimpangan dan kemiskinan ditentukan oleh komposisi belanja, kapasitas pelayanan, dan kualitas institusi. Kebijakan ekonomi fiskal daerah perlu menggabungkan penguatan pendapatan yang tidak distortif, formula transfer yang transparan, belanja produktif, dan

pemantauan hasil. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan ukuran otonomi fiskal yang lebih tepat, data panel subnasional yang panjang, dan desain kausal untuk membedakan pengaruh kewenangan, transfer, serta kualitas tata kelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, N., and M. Sakata. 2002. "Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States." *Journal of Urban Economics* 52(1): 93-108.
- Akita, T., A. A. Riadi, and A. Rizal. 2021. "Fiscal Disparities in Indonesia in the Decentralization Era: Does General Allocation Fund Equalize Fiscal Revenues?" *Regional Science Policy & Practice* 13(6): 1842-1865.
- Davoodi, H., and H.-F. Zou. 1998. "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study." *Journal of Urban Economics* 43(2): 244-257.
- Enikolopov, R., and E. Zhuravskaya. 2007. "Decentralization and Political Institutions." *Journal of Public Economics* 91(11-12): 2261-2290.
- Farida, N., A. Suman, and R. K. Sakti. 2021. "Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia." *Journal of Indonesian Applied Economics* 9(2): 1-9.
- Fisman, R., and R. Gatti. 2002. "Decentralization and Corruption: Evidence across Countries." *Journal of Public Economics* 83(3): 325-345.
- Gemmell, N., R. Kneller, and I. Sanz. 2013. "Fiscal Decentralization and Economic Growth: Spending versus Revenue Decentralization." *Economic Inquiry* 51(4): 1915-1931.
- Imi, A. 2005. "Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note." *Journal of Urban Economics* 57(3): 449-461.
- Kis-Katos, K., and B. S. Sjahrir. 2017. "The Impact of Fiscal and Political Decentralization on Local Public Investment in Indonesia." *Journal of Comparative Economics* 45(2): 344-365.
- Liza, L., and M. Mariana. 2023. "Can Budget Ratcheting Moderate the Relationship Between Financial Performance and Capital Expenditures?" *Journal of Data Acquisition and Processing* 38(3): 5472-5485. <https://doi.org/10.5281/zenodo.777718>.
- Mariana. 2019a. "Bantuan Rumah kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)." *Jurnal Tahqiq* 14(1): 108-118.
- Mariana. 2019b. "Penetapan Harga Penjualan Gas LPG Bersubsidi di Kecamatan Mutiara Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Tahqiq* 13(2): 190-203.
- Mariana, M., S. Abdullah, and M. Mahmud. 2020. "Corporate Governance Perception Index, Profitability and Firm Value in Indonesia." *Technology and Investment* 11(2): 13-21. <https://doi.org/10.4236/ti.2020.112002>.
- Mariana, M., S. Abdullah, and N. Nadirsyah. 2018. "Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, dan Keputusan Pemberian Kredit." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 8(2): 177-186. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>.
- Mariana, M., and A. Ibrahim. 2022. "Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *HEI EMA: Jurnal*

- Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1(1): 1-13.
- Nufiar, N., M. Mariana, and M. Ali. 2020. "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia." *Journal of Social Science* 1(4): 147-151.
- Ramadana, S. W., M. Mariana, R. Rahmaniar, and S. Bahgia. 2023. "Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7(2): 1831-1840.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>.
- Mariana. 2023. "Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 2(2): 108-115.
- Martinez-Vazquez, J., S. Lago-Peñas, and A. Sacchi. 2017. "The Impact of Fiscal Decentralization: A Survey." *Journal of Economic Surveys* 31(4): 1095-1129.
- Oates, W. E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism." *Journal of Economic Literature* 37(3): 1120-1149.
- Page, M. J., et al. 2021. "The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews." *BMJ* 372: n71.
- Qiao, B., J. Martinez-Vazquez, and Y. Xu. 2008. "The Tradeoff between Growth and Equity in Decentralization Policy: China's Experience." *Journal of Development Economics* 86(1): 112-128.
- Rodríguez-Pose, A., and R. Ezcurra. 2011. "Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth? Evidence from the OECD Countries." *Journal of Economic Geography* 11(4): 619-643.
- Sepulveda, C. F., and J. Martinez-Vazquez. 2011. "The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Equality." *Environment and Planning C: Government and Policy* 29(2): 321-343.
- Siburian, M. E. 2020. "Fiscal Decentralization and Regional Income Inequality: Evidence from Indonesia." *Applied Economics Letters* 27(17): 1383-1386.
- Siburian, M. E. 2022. "The Link between Fiscal Decentralization and Poverty: Evidence from Indonesia." *Journal of Asian Economics* 81: 101493.
- Sofilda, E., M. Z. Hamzah, and S. Kusairi. 2023. "Analysis of Fiscal Decentralisation, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia." *Cogent Economics & Finance* 11(1): 2220520.
- Suwanan, A. F., and E. H. Sulistiani. 2009. "Fiscal Decentralization and Regional Disparities in Indonesia: A Dynamic Panel Data Evidence." *Journal of Indonesian Economy and Business* 24(3): 328-336.
- Thornton, J. 2007. "Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered." *Journal of Urban Economics* 61(1): 64-70.
- Yushkov, A. 2015. "Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth." *Russian Journal of Economics* 1(4): 404-418.
- Zhang, T., and H.-F. Zou. 1998. "Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China." *Journal of Public Economics* 67(2): 221-240.